

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Implementasi kebijakan CBP dalam rangka KPSH di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta yang ditinjau dari faktor aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan belum berjalan dengan optimal. Berikut penjelasan dari aspek-aspek tersebut:

- a. Aspek komunikasi: penyaluran komunikasi (transmisi) melalui media cetak dan media elektronik yaitu faksimile internal perum BULOG, whatsapp, channel berita BULOG, tempo, kompas, surat rekomendasi, twitter dan instagram. Informasi yang disalurkan sudah cukup jelas karena belum ada sanggahan atau nota keberatan dari berbagai pihak. Konsistensi penyaluran informasi dalam publikasi melalui media cetak maupun elektronik belum optimal, walaupun dilaksanakan secara berkala setiap minggu dan menyampaikan laporan pelaksanaan KPSH BM dengan menggunakan CBP secara berkala paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari bulan berjalan kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- b. Aspek sumberdaya: staff pada perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta masih kurang dari jumlahnya tetapi semuanya sudah memiliki kualitas yang memadai. Informasi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan ini belum optimal. Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta memiliki kewenangan menerbitkan penyaluran atau *sales order*, menugaskan gudang untuk mengeluarkan beras KPSH atas dasar pembayaran dan menetapkan distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG. Dinas PPKUKM mempunyai kewenangan melakukan monitoring terhadap harga kebutuhan pokok tidak hanya beras saja ke pasar khususnya cipinang pd pasar jaya. Kewenangan food station yaitu

memantau beras di wilayah DKI Jakarta, mendata downline dan melakukan kontrol proses distribusi. Fasilitas yang disediakan Perum BULOG Pusat berupa sistem informasi terkait produksi dan perkembangan harga yang digunakan untuk menjaga stok digudang sedangkan pada BULOG kanwil DKI Jakarta menyediakan fasilitas kompleks pergudangan. Selain itu, dalam melaksanakan penugasan pengadaan stok CBP perum BULOG menggunakan fasilitas perbankan dengan menggunakan bunga komersil, namun pembayaran tagihan penyaluran stok CBP untuk KPSH sering mengalami keterlambatan yang berdampak pada peningkatan beban biaya bunga yang harus ditanggung perum bulog.

- c. Aspek disposisi: komitmen Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta melakukan penyaluran, monitoring, dan evaluasi terkait efektivitas KPSH secara acak ke distributor maupun ritel sudah terimplementasi dengan baik. Namun, kendala yang dihadapi adalah komitmen pelaksana eksternal atau pedagang yang kurang mendukung yaitu tidak memasang *price tag* atau spanduk, dan mencampur beras dengan menjual dengan harga premium.
- d. Aspek struktur birokrasi: pelaksanaan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang tertuang pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-05/DP100/04/2022 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium belum optimal. Selain itu, Perum BULOG Pusat mendapat tugas KPSH untuk tahun 2022 dengan tanggung jawab harus menjaga stok CBP. Selain itu, Perum BULOG Pusat mendapat tugas KPSH untuk tahun 2022 dengan tanggung jawab harus menjaga stok CBP dan tanggung jawab adalah dari pimpinan wilayah melakukan penerbitan surat penunjukan pada mitra yang memenuhi administrasi. Kendala yang dihadapi adalah penjualan pada tahun 2022 dilakukan secara konsinyasi sehingga terdapat risiko tidak

bayar dan monitoring yang diserahkan ke masing-masing kanwil dan tidak ada satu proses pemantauan secara langsung.

## B. Saran

Dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan CBP dalam rangka KPSH maka peneliti menyarankan kepada Pimpinan Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Aspek komunikasi: perlu menambahkan rutinitas publikasi dengan melakukan publikasi minimal seminggu 2 kali di media cetak dan media elektronik.
- b. Aspek sumberdaya: perlu melakukan rotasi, memperluas jangkauan penyebaran informasi melalui berbagai media cetak maupun elektronik seperti sosialisasi, dialog publik, kerjasama dengan radio dan pemasangan banner di pasar-pasar, data-data yang dimiliki harus mudah diakses dengan menganut SPBE, dan perlu pengkajian SOP terkait reviu yang masih berbelit dan lama.
- c. Aspek disposisi: perlu pengawasan penyaluran untuk memastikan pedagang memasang *price tag*/spanduk dan punishment dengan tidak menjadikan mitra distributor terhadap pelaku kecurangan memutus hubungan kerja.
- d. Aspek struktur birokrasi: perlu memperbaiki *Standard Operating Procedures* (SOP) khususnya terkait penjualan kembali dilakukan dengan *cash on carry* dan diperlukan aturan jelas yang mengatur keseragaman monitoring dan evaluasi pada kanwil dengan menyusun pedoman teknis tentang monitoring dan evaluasi terkait hal-hal informasi tentang lokasi penjualan, kuantitas dan harga beras KPSH yang dapat di beli oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussamad, Zuchri (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.
- Agustino, Leo (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Barlian, Eri (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press.
- Keban, Yeremias T. (2004), *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution (2003), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV.
- Suharno (2013), *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, Edi (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul (2014), *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra (1994), *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi (2012), *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.

### B. Jurnal, Skripsi, Thesis

- Alfia, Lutfi (2016), *Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 2, No. 3, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Anggara, Satria (2014), *Implementasi Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah di Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Fazry, Rachma Waty (2019), *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang*, Dinamika, Vol. 6 No. 4, Subang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang.

Jumiati, Hasanatul Rahmi (2020), *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Manajemen Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, Padang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Padang.

Kurnia, Asyifa Purwanto (2020), *Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional Dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara*, Manajemen Pertahanan, Vol. 6 No. 1, Bogor: Universitas Pertahanan.

Kusuma, Dedy AndhiDwi dkk. (2016), *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Jombang*, Tesis, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Magfiroh, Rofiatul dkk. (2021), *Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani*, Jurnal Respon Publik, Vol.15 No. 4, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.

Meigawati Dine, Melawati (2017), *Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi*, Jispo, Vol. 7 No. 1, Sukabumi: Jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhamadiyah Sukabumi.

Putri, Anggi Andani (2021), *Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Guna Ketahanan Pangan Pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat*, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana.

Kepmendag RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022.

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-05/DP100/04/2022 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium.

#### **D. Dokumen**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB (2022), *Laporan Akhir Kajian Usulan Kebijakan Pangan*, Bogor: IPB University

Utami, Anisa Dwi (2020), *Laporan Kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Mendukung Ketahanan Pangan*, Jakarta: Kemenko Perekonomian.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**